

**PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG
1942-1945**

Sholeha¹ dan Elis Setiawati²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Metro

Email: sholikinumm@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this research is that education during the Japanese occupation experienced various challenges for the people of Indonesia. The aims of this study are: 1) To analyze and describe education in Indonesia during the Dutch colonial period 1900-1942; 2) To analyze and describe education in Indonesia during the Japanese occupation period 1942-1945; 3) To analyze and describe the driving and inhibiting factors of education in Indonesia during the Japanese occupation period 1942-1945. The research method uses historical methods, namely heuristics, literature study, source criticism, interpretation and historiography. Based on the results of the study, the education that was applied during the Dutch colonial period was given differently and was limited based on race/ethnic social position. Entering the era of Japanese occupation in Indonesia, the Dutch Colonial education system was then changed to semi-military education by applying physical training to students, military and strict indoctrination. Nevertheless, the Indonesian people get many opportunities in the field of education. Education organized by the Japanese military government in Indonesia has developed, through the simplification of the system, all levels of indigenous people are given the right to be able to access it, until Indonesian is used as the language of instruction. However, behind the development there are obstacles in it starting from the lack of educators, the lack of textbooks, the decreasing number of students attending school and the number of schools also decreasing very drastically. Education carried out during the colonial era did not pay attention to education in the context of humanity, but only to maintain one-sided power, political and economic interests.

Keywords: Education, Japanese Occupation Period

PENDAHULUAN

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda ditaklukan oleh Jepang di Indonesia, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia. Semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin "Asia Timur Raya".

Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, Sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Selanjutnya Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan saja. Jepang juga menyediakan sekolah rakyat (Kokumin Gakko) sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru.

Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang (Taiso), mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar (Puspita, 2018).

Sistem pendidikan yang di anut oleh Jepang untuk Indonesia sangat membuat rakyat Indonesia menderita, karena pendidikan yang diberikan oleh Jepang berbeda jauh dengan pendidikan pada masa kolonial Belanda. Jepang memberikan pendidikan di Indonesia hanya untuk keuntungan pribadinya saja, Jepang hanya sekedar membudakan rakyat Indonesia melalui pendidikan, karena pendidikan yang di berikan oleh

Jepang lebih untuk kemiliteran bahkan rakyat Indonesia menjadi buruh pada masa pendudukan Jepang. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang tidak terlalu lama kurang lebih hanya 3 tahun saja (1942-1945), namun memberikan dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.

Pada masa Jepang, pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Jepang yang hendak menghapus pelajaran agama islam menggantinya dengan pelajaran agaman Shinto, oleh karena itu bahasa dan aksara arab dikurangi frekuensinya, serta pendidikan pada umumnya mendapat penekanan. Karena Jepang menyadari untuk me-Nipponkan bangsa Indonesia dengan jalur pendidikan dan Jepang juga merubah kurikulum pendidikan (Abbas, 2018: 64-69).

Menurut (Purwanti, 2018) Tujuan dalam bidang pendidikan ini adalah supaya murid-muridnya dapat penggunaan bahasa barat di wilayah seluruh Indonesia. Khususnya dalam bidang pendidikan secara sistematis diarahkan untuk menanam norma-norma militer Jepang kearah pembentukan semangat *Bushido* (tatacara kesatria). Jadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia juga diterapkan proses Jepangisasi baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Semangat *Bushido* ditanamkan untuk meningkatkan rasa hormat kepada pemerintah militer Jepang.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode historis. Metode sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya (Herdiana, 2016). Tahapan penelitian dimulai dengan heuristik. Heuristik adalah langkah seorang peneliti untuk menumpulkan sumber-sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidences*), dengan memasuki tahap pengumpulan sumber (*heuristik*) seorang peneliti sejarah memasuki lapangan penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984). Kemudian dilanjutkan dengan studi kepustakaan yang merupakan kegiatan mempelajari buku-buku atau literatur guna menemukan fakta-fakta atau konsep-konsep sebagai bahan pendukung pembahasan masalah. Selanjutnya dilakukan kritik sumber untuk pengujian terhadap data yang digunakan dalam penelitian sejarah. Kritik atau verifikasi itu ada dua macam: autentitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Daliman, A. 2012). Kemudian melakukan Interpretasi untuk penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekontruksi realitas masa lampau. Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi yakni tahapan penulisan sejarah. Keberhasilan (signifikasi) semua fakta yang dijarah melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi (Daliman, A. 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Pendidikan masa pendudukan Jepang, tidak dapat lepas dengan keadaan pendidikan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat tingkatan-tingkatan

pendidikan di sekolah dasar, yang satu sama lain terdapat jurang pemisah. Tingkatan semacam tersebut pada masa pendudukan Jepang dihilangkan. Semua sekolah dasar memiliki derajat yang sama yaitu bernama Sekolah Rakyat. Penghapusan tingkatan pendidikan itu bagi bangsa Indonesia besar sekali manfaatnya, karena dengan demikian tidak terdapat lagi diferensiasi antara bangsa-bangsa kita sendiri yang pada hakekatnya sebagai manusia berkedudukan sama.

Dasar pendidikan di sekolah-sekolah ialah pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan diliputi oleh suasana perang, maka banyak nyanyian-nyanyian dan semboyan serta latihan-latihan dihubungkan dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi perang. Dengan semboyan "Asia Timur Raya Untuk Kemakmuran Bersama", maka Semangat Jepang ditanamkan melalui sekolah-sekolah. Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. Jumlah sekolah, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, maupun Sekolah Kejuruan sangat menurun. Hal ini mengakibatkan makin bertambahnya orang-orang yang buta huruf. Pendidikan di Sekolah Dasar diseragamkan menjadi 6 tahun. Hal ini untuk memudahkan pengawasan baik dalam hal isi maupun penyelenggarannya

Adanya kebijakan pendidikan dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki dua prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yakni : pertama, menghapus pengaruh kolonial Barat dikalangan rakyat Indonesia. Kedua, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Jepang , juga merugikan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan sehingga angka buta huruf di Indonesia pada saat itu meningkat.

A. **Sistem Pendidikan**

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan masa yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia. Setelah Kejayaan penjajahan Belanda lenyap, Jepang berada di Indonesia. Mereka bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang. Dan sistem persekolahan di masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dihapus. Dengan demikian terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis sejak masa Jepang bahasa dan istilah-istilah mulai dipergunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan (Mestoko, 1985 : Hlm138). Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam yakni Sekolah Dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah untuk diawasi, sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda di tutup. Begitu juga materi pengetahuan soal belanda dan Eropa di tutup.

Adapun tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang pasifik hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya. Berbagai cara yang dilakukan oleh Jepang dalam mengelabui bangsa Indonesia untuk kepentingan politiknya. Demi kepentingan perang, Jepang mengambil pasukan dari Indonesia dengan menyuguhkan pendidikan kemiliteran. Namun demikian, dibalik kekejaman Jepang itu, Indonesia banyak memanfaatkan berbagai toleransi dari pihak Jepang terutama dalam bidang pendidikan.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Beberapa kegiatan dan pembekalan bagi para guru sengaja dilakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan suksesnya propaganda Jepang.

Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, menjadikan sistem pendidikan atau persekolahan menjadi lebih merakyat (populis). Pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat Indonesia (Demokrasi Pendidikan). Hapusnya sistem Konkordansi dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat, meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan perang Jepang.

B. Model Pembelajaran

Menurut R.E. Elson, 2008 (dalam Nuryanto, 2020) Pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia adalah pendidikan semi militer dengan menerapkan latihan fisik pada para murid, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Selain itu, bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, juga bahasa Jepang, sedangkan penggunaan bahasa Belanda untuk keperluan resmi dihapuskan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Dampak positif terkait hal tersebut, yaitu bahasa Indonesia bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, ada pula dampak negatifnya, yaitu pendidikan di Perguruan Tinggi hampir tidak mungkin karena buku-buku dalam bahasa Belanda atau Inggris juga dilarang Menurut M.C. Ricklefs, 2008 (dalam Nuryanto, 2020). Jepang menerapkan peraturan untuk menghormati ke arah matahari terbit karena bangsa Jepang mengakui sebagai keturunan *Dewa Matahari*. Selain itu, Jepang juga menerapkan etos keperajuritan kepada anak-anak sekolah dengan mengadakan olahraga senam (*Taiso*) dan mengikuti latihan baris-berbaris atau perang-perangan serta menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*.

Menurut Aiko Kurasawa, 1993 (dalam Nuryanto, 2020) Jepang juga menggunakan lagu sebagai salah satu sarana propaganda untuk menyebarkan gagasan serta meningkatkan nilai moral dan semangat. Lagu-lagu militer Jepang dan kepahlawanan Jepang berulang-ulang diajarkan di sekolah-sekolah. Jepang menyebarkan buku-buku yang berisikan tentang lagu-lagu Jepang dengan alasan untuk meningkatkan moral dan semangat sebagai sesama Bangsa Asia. Namun, sebenarnya hal ini dilakukan Jepang untuk meningkatkan semangat rakyat yang hidup dalam situasi sosial ekonomi yang menyedihkan dan sebagai pengganti atau saluran pesan politik.

Meskipun banyak kemerosotan atau kemunduran dalam bidang pendidikan khususnya baik itu berupa kuantitas maupun kualitas. Tapi masih banyak hal-hal yang justru menguntungkan bangsa Indonesia sendirinya, Misalnya bangsa Indonesia dilatih dan didik untuk memegang jabatan walaupun masih dibawah pengawasan orang-orang Jepang.

Pemerintahan Jepang secara tidak langsung juga mempengaruhi kebudayaan kita, bahkan kita diajarkan bagaimana caranya mengatur suatu organisasi pemerintah bahkan sampai ukuran terkecil yaitu RT dan

RW, keduanya merupakan bentukan dari pemerintah Jepang di Indonesia Menurut Ekajati, 1998 (dalam Saminto, 2019).

Kebijakan Jepang selanjutnya adalah yang menghapus diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama di Indonesia. Jadi bukan hanya golongan bangsawan atau orang-orang Eropa saja yang diperbolehkan mengenyam pendidikan, bahkan seluruh bangsa Indonesia diperbolehkan bersekolah Menurut Hapsari, Ratna, 2012 (dalam Saminto, 2019).

C. Murid

Semenjak Jepang menguasai Indonesia, sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah ada pada masa Belanda diganti dengan sistem Jepang. Segala upaya ditunjukkan untuk kepentingan memenangkan Perang Jepang untuk Melawan Sekutu. Oleh karena itu, murid-murid hanya mendapatkan pengetahuan yang sangat sedikit, kegiatan persekolahan banyak diisi dengan kegiatan pelatihan perang atau bekerja untuk kepentingan militer Jepang.

Secara konkritnya tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah untuk menyediakan tenaga Cuma-Cuma (*Romusha*) dan tenaga militer untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan mengikuti pelatihan fisik, pelatihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Pada akhir masa Jepang tampak tanda-tanda tujuan men-Jepangkan anak-anak atau murid-murid Indonesia. Dikerahkan barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama *Sendenbu*, untuk menanamkan ideology baru untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya (Nuryanto, 2020: Hlm 50-51).

Para murid dididik agar mempunyai semangat perang, seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan dan latihan (Diklat) dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang, yang pelaksanaannya dilaksanakan di Jakarta selama tiga bulan. Untuk menanamkan semangat Jepang, maka diajarkan bahasa Jepang dan nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran pada para murid. Pendidikan yang diajarkan oleh Jepang kepada para murid untuk selalu disiplin serta memiliki jiwa dan semangat Jepang (*Nippon Seishin*). Semangat yang diutamakan ialah semangat kesatria atau *Bushido* yaitu berbakti kepada pemerintah Jepang (pemimpinnya) dan orang tuanya.

Karena murid adalah pengemban hari depan Indonesia dalam rangka "Kemakmuran Bersama Asia Raya", kepada murid-murid dikenakan ketentuan dan indoktrinasi ketat. Kepada mereka antara lain dibebankan kewajiban dan keharusan sebagai berikut :

1. Setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang
2. Setiap pagi harus mengibarkan bendera Jepang "*Hinomaru*" dan menghormat kepada Kaisar Jepang "*Tennno Heika*"
3. Setiap pagi harus bersumpah setia kepada cita-cita Indonesia dalam rangka Asia Raya "*Dai Toa*"
4. Setiap pagi harus senam "*Taiso*" untuk melihara semangat Jepang
5. Melakukan-melakukan latihan fisik dan militer

6. Murid-murid pada waktu yang ditentukan melakukan kerja bakti "*Kinrohosi*" membersihkan asrama militer, jalan-jalan raya, menanam pohon jarak, mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan militer, dan lain sebagainya
7. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jepang merupakan bahasa wajib. Bahasa daerah diberikan di Sekolah Dasar di kelas I dan II (Mestoko, 1985 : Hlm 140).

D. **Guru**

Bergantinya kekuasaan Belanda ke tangan Jepang pada bulan Maret 1942 mempengaruhi pula kebijakan mengenai pendidikan secara umum. Khusus untuk Sekolah Guru, pemerintah Jepang menggabungkan berbagai sekolah guru menjadi satu sekolah. Pemerintah Jepang hanya membuka sekolah guru yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan sekolah guru swasta ditutup dan tidak diizinkan untuk dibuka. Hanya Perguruan Muhammadiyah dan Taman Siswa yang diperbolehkan untuk dibuka.

Sekolah guru bentukan pemerintah militer Jepang memiliki sistem yang berbeda, yaitu adanya peraturan pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki menempati sekolah guru laki-laki atau disingkat (SGL), sedangkan siswa perempuan menempati sekolah guru perempuan (SGP). Para siswa SGL dan SGP merupakan lulusan Sekolah Dasar yang kemudian menempuh pendidikan selama empat tahun dalam asrama.

Penerapan sistem asrama ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah Jepang mengontrol dan mendoktrin siswa melalui berbagai program pendidikan. Program pendidikan tersebut, diantaranya latihan kemiliteran (*kyooren*), pengandian masyarakat atau kerja bakti paksa (*Kinrohoshi*), dan pendidikan jasmani. Sekolah calon guru SD di zaman Jepang terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Belitar.

Keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa pemerintahan militer Jepang merosot dengan dratis dibandingkan dengan keadaan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah Dasar menurun jumlahnya dari 21.500 menjadi 13.500, Sekolah Lanjutan dari 850 menjadi 20. Begitu pula murid Sekolah Dasar menurun pula sebanyak 30% sedangkan murid Sekolah Menengah merosot 90%. Jumlah Guru Sekolah Dasar menurun 35% dan guru Sekolah Menengah merosot 95% sehingga tinggal 5% yang aktif. Pendek cerita dalam bidang pendidikan pada masa Jepang memperlihatkan kemunduran menyolok.

E. **Kurikulum Pendidikan**

Menurut Legge, 1993 (dalam Susanti, F. 2013) Pemerintah pendudukan Jepang memberlakukan kebijakan dalam bidang pendidikan yang kurikulumnya ditujukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Sistem dualisme dan konkordansi yang pernah diterapkan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dihapus dan pendidikan sangat terbuka bagi semua anak-anak pribumi, sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Pelajaran-pelajaran yang diberikan pada masa penjajahan Jepang meliputi Sejarah Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, dan Kebudayaan Jepang. Untuk

menyebarkan ideologi dan semangat Jepang, para guru ditatar secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang selama tiga bulan di Jakarta. Mereka diharuskan dan diwajibkan meneruskan materi yang telah diterima kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang itu kepada murid-murid, diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian perjuangan, atau nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran Menurut Rifa'I, 2011 : 85 (dalam Nuryanto, 2020). Memang kehadiran Jepang di Indonesia dapat menanamkan jiwa berani pada bangsa Indonesia. Akan tetapi semua itu hanya untuk kepentingan Jepang saja.

F. **Kompetensi Lulusan**

Jepang memang mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun, dilihat dari hasilnya, kualitas siswa pada era Jepang bisa dikatakan lebih rendah dari pada masa Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena dari faktor guru dan siswa. Guru kualitasnya menurun karena pelatihan yang diberikan tidak maksimal, dan tenaga guru pada masa Jepang sangat terbatas. Selain itu, guru dan siswa mendapat beban tambahan. Beban tambahan tersebut menjadikan siswa dan guru tidak benar-benar berkonsentrasi dalam pelajaran di kelas.

Beban tambahan yang diberikan pada guru dan siswa seperti melakukan kerja bakti dan *Kinro Hoshi* (Wajib kerja tanpa upah bagi masyarakat pamong desa dan pegawai rendahan) untuk memperbaiki tempat umum, membangun dan memperbaiki infrastruktur, bekerja di pabrik-pabrik, bekerja di sawah, menanam pohon jarak, dan lainnya. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua siswa, bahkan siswa di sekolah rendah pada jam pelajaran akibatnya sedikit waktu untuk belajar. Kerja bakti ini bahkan menjadi bagian kurikulum sehingga proses pembelajaran yang lain menjadi terganggu.

Tidak hanya itu, proses belajar mengajar juga terganggu dengan adanya *Kushukeiho* atau tanda peringatan dari bahaya serangan udara. Peringatan serangan udara ini berupa sirene atau kentongan, dan ketika berbunyi siswa harus menggigit sepotong karet dan menyembunyikan diri di lobang perlindungan yang dibangun di halaman sekolah. Dan kejadian ini sering berlangsung Menurut Aiko Kurasawa : 368 (dalam Nuryanto, 2020: 59).

Siswa dan guru-guru yang selesai mengikuti pelatihan akan diberi ijazah. Nilai dikeluarkan sesuai dan diberikan untuk hasil pendidikan. Namun, sayang sejauh ini belum ditemui data yang akurat tentang sistem skor dan penilaian pada masa pendidikan Jepang. Pada masa ini, hal yang penting di catat adalah Jepang lebih menekankan untuk menghasilkan militer dan tenaga buruh, yang membuat usaha untuk pendidikan lanjutan menjadi kurang, pendidikan dasar dan masyarakat melek huruf lebih ditekankan dari pada penciptaan orang dengan kecakapan dan keahlian yang baik.

Menurut Aiko Kurasawa, 1993 : 362 (dalam Nuryanto, 2020) pada akhir tahun pendudukan Jepang *Euforia* sekolah sudah merosot dan siswa banyak yang mengalami drop out. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi sehingga siswa harus keluar dari sekolah untuk bekerja demi memenuhi kekurangan tenaga kerja akibat dari *Romusha*.

Faktor Pendorong Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Penyederhanaan Sistem Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan pemerintah masa pendudukan Jepang di Indonesia, Pada sebelumnya tidak semua kalangan bumiputra bisa mengakses pendidikan dengan penyederhanaan sistem semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya.

Djohan Makmur, P. S., & S., H. (1993: 101) mengungkapkan penghapusan tingkatan pendidikan bagi bangsa Indonesia memiliki manfaat yang besar, karenan dengan demikian tidak terdapat lagi diferensiasi antara bangsa-bangsa kita sendiri yang pada hakekatnya sebagai manusia berkedudukan sama. Sebagai mana Rifa'i, M. (2011) menyatakan dengan menyederhanakan sistem pendidikan, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, menjadikan sistem pendidikan atau persekolahan menjadi lebih merakyat. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda.

Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pengantar

Pemakaian bahasa Belanda di sekolah-sekolah dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan merupakan mata pelajaran utama (Wahyudi, A, 2018). Demikian pula bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah-sekolah. Hal tersebut menjadikan pendidikan masa Jepang dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan yang dalam waktu singkat dikeluarkan oleh Kantor Pengajaran (*Bunkyo Kyoku*) (Soemanto & Doeyarno, 1983). Dengan demikian bahasa Indonesia mendapat peranan penting. Pelajaran bahasan daerah diberikan kepada murid-murid kelas I dan kelas II sebagai bahasa pengantar sampai mereka mengerti bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia baru mulai diajarkan di kelas III (Djohan Makmur & S., 1993)

Pembentukan Sekolah Guru

Jepang juga membentuk sekolah guru dua tahun (*shoto shihan gakko*), sekolah menengah guru empat tahun (*cuutoo shihan gakko*), dan sekolah guru tinggi enam tahun (*koto shihangakko*).

Pelajaran-pelajaran yang diberikan meliputi sejarah ilmu bumi, bahsasan Indonesia (Melayu), adat istiadat, bahasa Jepang, ideologi Jepang, dan ke 60 Jepang. Untuk menyebarkan ideologi dan semangat Jepang para guru ditatar secara khusus oleh pemimpin Jepang selama tiga bulan di Jakarta. Mereka diwajibkan meneruskan materi yang telah diterima kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang tersebut guru mengajarkan kepada murid-murid bahahasa Jepang, nyanyian-nyanyian perjuangan, atau nyanyian semangat kemiliteran (Mulyadi, B, 2014)..

Rochim, R. S. (2017) mengungkapkan Jepang memberikan doktrin kepada para pengajar adalah *Hakko Ichiu*. *Hakko Ichiu* adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya (termasuk Asia Tenggara) dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang.

Ditutupnya Sekolah Yang Berbahasa Belanda

Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup, Salah satu sekolah yang harus ditutup, *Hollandsche Chineesche School* atau HCS (Rifa'i, M 2011). Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah terlanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi. **Penerapan Tingkat Pendidikan Baru**

Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar enam tahun (*kokumin gakko*), ada sekolah menengah pertama tiga tahun (*Shoto Chu Gakko*) dan sekolah menengah tinggi tiga tahun (*Koto Chu Gakko*). Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat bidang pendidikan (Rifai, M 2011).

Sebenarnya tujuan pendidikan di zaman penjajahan Jepang tidak banyak yang dapat diuraikan, sebab murid disibukan dengan peperangan sehingga perhatian terhadap pendidikan sangat sedikit. Rayuan Jepang kepada bangsa Indonesia mengatakan bahwa Jepang adalah "saudara tua" yang datang ke Indonesia untuk mencapai kemakmuran bersama di Asia Timur Raya atau dikenal dengan *hakko inciu* sebagai landasan utama pendidikan pada masa zaman pendudukan Jepang.

Faktor penghambat Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Kurangnya Tenaga Pendidik.

Mengenai guru, pada pendidikan masa pendudukan jepang tenaga pendidik sangat minim, karena pemerintah kolonial Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru Indonesia untuk sekolah-sekolah menengah, apa lagi menengah atas. mengingat Jepang tidak bersimpati terhadap Bangsa Barat. Hal itu terbukti selang dua minggu setelah Jepang mengambil alih kekuasaan. Para Bruder dilarang mengajar HIS, Schakelschool, dan MULO (Nino Oktorino, 2016). Penggunaan Bahasa Belanda pun dilarang. Para Bruder juga dilarang melakukan semua aktivitas kegiatan sekolah. Mulai terjadi pelarangan terhadap simbol-simbol Belanda termasuk perusakan-perusakan gedung sekolah Sehingga saat masa penjajahan Belanda berakhir hanya ada beberapa orang guru Indonesia yang mempunyai wewenang penuh untuk mengajar sekolah lanjutan (Rustam, F, 2003).

Minimnya Buku Pelajaran

Jepang yang ingin menghapuskan pengaruh Belanda di Indonesia, melarang penggunaan buku pelajaran yang di tulis dalam bahasa Belanda. Sebagaimana yang diungkapkan Wahyudi, A. (2018: 44) "pada pendidikan masa sebelumnya semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya". Akan tetapi sebaliknya, karena kesulitan-kesulitan inilah yang rupannya mendorong bangsa Indonesia untuk melengkapi bahasannya dengan istilah-istilah baru

yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Disamping itu, pemerintah pendudukan Jepang hanya mendorong bangsa Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang yang masih asing sama sekali bagi telinga bangsa Indonesia.

Menurunnya Jumlah Sekolah

Kebijakan untuk menyederhanakan sistem persekolahan oleh pemerintah Jepang menimbulkan banyak sekali dampak setelahnya. Dampak yang terlihat dari penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan banyak sekolah yang kemudian ditutup dan tidak beroperasi lagi dan banyak gedung-gedung sekolah yang kemudian berubah fungsi menjadi barang-barang militer dan gudang penyimpanan amunisi dan bahan makanan persediaan perang militer Jepang.

Sebagaimana yang diungkapkan Rifa'i, M. (2011: 89)

“Hal yang memprihatinkan adalah merosotnya jumlah sekolah dibandingkan dengan keadaan pada zaman Hindia-Belanda, seperti menurunnya jumlah sekolah dasar dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi hanya 20. Demikian juga jumlah murid sekolah dasar menurun sebanyak 30% dan murid sekolah menengah merosot 90%. Jumlah guru sekolah rendah menurun 35% dan guru sekolah menengah merosot 95%”.

Pendidikan yang sebelumnya berlapis-lapis dan sangat eksklusif menjadi lebih sederhana dan dinyatakan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun rupanya, kebijakan tersebut kurang membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Sekolah Berfokus Pada Kegiatan Militer

Pendidikan masa pendudukan Jepang tidak banyak mengalami perkembangan jika dibandingkan pada pendidikan masa sebelumnya, dikarenakan Jepang lebih fokus dengan perang, masa pendudukannya di Indonesia. Pada era pendudukan Jepang, pendidikan sekolah bukan merupakan prioritas utama meskipun tetap menjadi hal yang cukup penting. Prioritas pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah dalam sektor pemerintahan, propaganda, dan pendidikan sosial. Kegiatan sekolah hal tersebut tidak jauh dengan konteks Jepang sedang berperang (Gunawan, 1986). Kegiatan dikatakan berhubungan dengan sekolah tersebut, antara lain mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang, membersihkan bengkel-bengkel dan asrama asrama militer, menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan makanan, menanam pohon jarak untuk bahan pelumas.

Masa Pendudukan Jepang Yang Singkat

Waktu yang singkat pendudukan Jepang di Indonesia mengakibatkan pendidikan masa Jepang tidak banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu (Yasmis, Y. 2007). Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. Jumlah sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah kejuruan sangat menurun. Hal ini mengakibatkan makin bertambahnya orang-orang yang buta huruf.

KESIMPULAN

Pendidikan pada masa kolonial Belanda tidak memberikan perhatian sebagaimana pendidikan dalam konteks kemmanusiaan, tetapi hanya untuk mempertahankan kekuasaan, kepentingan politik, ekonomi sepihak dan diberikan berbeda beda serta terbatas berdasarkan ras/etnis kedudukan sosialnya. Penyelenggaraan sekolah dibedakan antara untuk anak-anak Eropa, anak-anak Timur Asing, dan anak-anak pribumi. Pendidikan jaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya.

Pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia adalah pendidikan semi militer dengan menerapkan latihan fisik pada para murid, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan. Beberapa kegiatan dan pembekalan bagi para guru sengaja dilakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan suksesnya propaganda Jepang, namun disisi lain kebijakan yang dilakukan masa pendudukan Jepang menjadi hambatan untuk berkembangnya pendidikan Indonesia.

Pendidikan diselenggarakan pemerintah militer Jepang di Indonesia, sangat berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan pada masa Belanda, karena semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya. Namun pada dasarnya pendidikan Jepang Untuk Indonesia hanya sebagai propaganda belakang, karena pasca pemberlakuan kebijakan justru mengakibatkan semakin turunnya murid-murid yang bersekolah dan jumlah sekolah juga berkurang dengan sangat drastis.

SARAN

Agar pendidikan di indonesia terus berkembang maka harus terus dilakukan upaya perbaiki serta pembaharuan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah narasi sejarah pendidikan di Indonesia khususnya masa pendudukan Jepang serta dapat digunakan sebagai refrensi untuk peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2018). Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Jepang. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 64-69.
- Apri Nuryanto, d. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Daliman, A. (2012). *metode penelitian sejarah*. yogyakarta : Ombak.
- Djohan Makmur, P. S., & S., H. (1993). *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.

- Gumelar, H. P. A., Hidayat, B., & Kuswono, K. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android Materi Sejarah Pergerakan SMA di Lampung. *SWARNADWIPA*, 3(1).
- Hartati, U., & Refa'i, R. A. (2019). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Berbasis Karakter Untuk Kelas XI SMA Negeri 1 Pasirsakti. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 70-83.
- Hermana Soemantrie, H. W., & Hidayati, S. (2017). *Perkembangan Kurikulum SMA di Indonesia (Suatu Perspektif Historis Dari Masa Ke Masa)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Kuswono, K. (2020). Metro Tempo Dulu: Sejarah Kota Metro Era Kolonisasi 1935-1942 (B. Hidayat & U. Hartati (eds.)).
- Kuswono, K., Sumiyatun, S., & Setiawati, E. (2021). Pemanfaatan Kajian Sejarah Lokal Dalam Pembelajaran Sejarah di Indonesia. *JURNAL LENTERA PENDIDIKAN PUSAT PENELITIAN LPPM UM METRO*, 6(2), 206-209.
- Makmur, D. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Mestoko, S. (1985). *pendidikan di indonesia dari jaman ke jaman*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Mulyadi, B. (2014). Model pendidikan karakter dalam masyarakat Jepang. *Izumi*, 3(1), 69-80.
- Nuryanto, A. (2020). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Praseyo, A. B., & Hartati, U. (2022). Inventarisasi Potensi Cagar Budaya Peninggalan Masa Penjajahan Belanda Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. *SWARNADWIPA*, 3(3).
- Purwanti, N. (2018). pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945 di Rembang. *Jurnal Noken*, 77-94.
- Puspita, P. (2018). pendidikan indonesia pada masa penjajahan belanda dan Jepang. *pendidikan di masa penjajahan*.
- Rahma, A. D., Suswandari, & Naredi, H. (2020). Jugun LANFU : Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Jawa Barat tahun 1942-1945. *Journal of History Education vol 1 nomer 3*, 36--49.
- Rifa'i, M. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta. Ar:Ruzz Media.
- Rochim, R. S. (2017). *Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Surabaya Tahun 1942-1945* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Saminto, S. S. (2019). Peran Pendidikan Di Masa Kependudukan Jepang (1942-1945) Terhadap Perubahan Budaya Di Jawa Barat. *Jurnal Artefak*, 13-18.
- Soemanto & Doeyarno, (1983). *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya. Usaha nasional
- Wahyudi, A. (2018) Perbandingan Sistem Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) Dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).
- Yasmis, Y. (2007). Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 24-32.